

# **Frame Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Berita Tentang Cemaran Obat Sirup dan Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak**

Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

33-54

© The Author(s) 2023



Volume 20.1 Januari-Juni 2023i

Publikasi *online*: 24 Agustus 2023

<https://jisip.jurnaliisipjakarta.id>

DOI: 10.36451/jisip.v20i1.9

**Umi Septia Rahayu<sup>1</sup>  Rohmadtika Dita<sup>2</sup>  dan Syafril Tahar<sup>3</sup> **

<sup>1</sup>Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jakarta, Indonesia

<sup>2</sup>Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jakarta, Indonesia

<sup>3</sup>Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, Jakarta, Indonesia

## **Corresponding Author:**

Umi Septia Rahayu, Program Studi Ilmu Komunikasi, IISIP Jakarta, Jl. Raya Lenteng Agung No. 32, Jakarta Selatan, Jakarta, 12610, Indonesia.

E-mail: [umi@iisip.ac.id](mailto:umi@iisip.ac.id)

## **Abstrak**

Kasus gagal ginjal akut (GGA) pada anak menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media massa. Artikel ini melaporkan hasil penelitian tentang frame tanggung jawab pemerintah dalam berita terkait gagal ginjal akut dan cemaran obat sirup. Metode penelitian yang digunakan analisis framing Robert N. Entman terhadap enam berita pada media online Kompas.com dan Liputan6.com periode Oktober - November 2022. Hasil analisis menunjukkan terdapat persamaan frame antara Kompas.com dan Liputan6.com yaitu tuduhan bahwa pemerintah tidak bertanggung jawab terhadap kasus gagal ginjal akut dan tuntutan tanggung jawab terhadap Kementerian Kesehatan dan BPOM untuk bertanggung jawab secara pidana maupun perdata atas kasus gagal ginjal akut.

Perbedaan frame antara Kompas.com dan Liputan6.com adalah terkait aspek penonjolan isu yang diangkat masing-masing media. Kompas.com menyoroti aspek pemerintah yang saling melempar tanggung jawab terkait santunan dan sulitnya mekanisme perawatan di rumah sakit, sementara Liputan6.com menonjolkan aspek tidak adanya tanggungan biaya pengobatan dan potensi maladministrasi Kemenkes dan BPOM dalam kasus gagal ginjal. Rekomendasi yang disampaikan oleh Kompas.com dan Liputan6.com terkait kasus gagal ginjal akut pada anak dan cemaran obat sirup adalah pemerintah harus bertanggung jawab kepada korban terkait pengobatan, perawatan, dan santunan. pemerintah juga harus memperketat izin edar obat sirup agar kasus gagal ginjal akut tidak terulang kembali.

### **Kata Kunci**

Anak; Cemaran Obat Sirup; *Frame*; Gagal Ginjal Akut; Tanggung Jawab Pemerintah.

### **Abstract**

*The cases of acute kidney injury in children are in the spotlight of many parties, including the mass media. This article reports the results of research on the framework of government responsibility in news related to the acute kidney failure and drug syrup contamination. The research method used is Robert N. Entman's framing analysis of six news stories on the online media Kompas.com and Liputan6.com for the October-November 2022 period. The results of the analysis show that there are similarities in the frames between Kompas.com and Liputan6.com, namely the accusation that the Government is not responsible against the cases of acute kidney failure and demands for responsibility against the Ministry of Health and BPOM to be held criminally and civilly responsible for the cases of acute kidney failure. The difference in the frames between Kompas.com and Liputan6.com is related to the aspect of highlighting the issues raised by each media. Kompas.com highlights aspects of the government shifting responsibility to each other regarding compensation and the difficulty of treatment mechanisms at hospitals, while Liputan6.com highlights aspects of not being responsible for medical expenses and the potency for maladministration by the Ministry of Health and BPOM in cases of kidney failure. The recommendations made by Kompas.com and Liputan6.com regarding cases of acute kidney failure in children and drug syrup contamination are that the government must be responsible to victims regarding treatment, care and compensation. The government must also tighten the distribution permits for syrup drugs so that cases of acute kidney failure do not recur.*

### **Keywords**

*Acute Kidney Injury; Children; Contamination of Medicine Syrup; Frames; Government Responsibilities*

## Pendahuluan

Kesehatan nampaknya menjadi isu yang sangat penting beberapa tahun terakhir ini. Berbagai jenis penyakit melanda banyak negara, diantaranya *corona virus disease* (Covid-19), virus Hendra, hepatitis akut, dan cacar monyet. (CNN, 2022).

Selain penyakit tersebut, kembali muncul kasus penyakit yang menyita perhatian dunia, yaitu gagal ginjal akut pada anak. Gagal ginjal merupakan kondisi di saat ginjal tidak berfungsi dengan baik karena terdapat kerusakan pada organ tersebut. Penyakit gagal ginjal dapat menyerang siapa saja, termasuk anak-anak. Gagal ginjal pada anak terbagi ke dalam dua jenis :

1. *Acute Kidney Injury* (AKI) atau gagal ginjal akut merupakan kondisi gagal ginjal yang terjadi secara mendadak. AKI bisa disebabkan oleh penyumbatan saluran urin, gangguan pada aliran darah ke ginjal, atau masalah pada ginjal itu sendiri.
2. *Chronic Kidney Disease* (CKD) atau gagal ginjal kronis yaitu kondisi gagal ginjal yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal secara bertahap, dapat terjadi selama tiga bulan atau lebih. Penyebabnya ialah terdapat kerusakan pada jaringan ginjal. (Siloamhospital, 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara gagal ginjal akut dengan kasus Covid-19. Covid dapat menyebabkan komplikasi berbagai macam organ, seperti jantung, saluran nafas, darah, dan ginjal. Penelitian kohort terhadap 138 pasien melaporkan bahwa 3,6% pasien (yang menderita Covid-19) berkembang menjadi GGA dan 2 pasien mendapat terapi penggantian fungsi ginjal (CRRT). (Wang D, 2020).

Penelitian berjudul, “Gagal Ginjal Akut sebagai Komplikasi Covid-19: *Literature Review*.” menunjukkan Gagal Ginjal Akut pada Covid-19 sangat sering terjadi terutama pada pasien berat atau yang mengalami kondisi kritis. Kerusakan ginjal dapat terjadi karena serangan langsung dari virus itu sendiri, atau dikarenakan badai sitokin yang disebabkan oleh abnormalitas sistem imun. Hipotensi atau dehidrasi, hipoksemia, sepsis, dan obat-obatan nefrotoksik juga dapat menyebabkan Gagal Ginjal Akut. (Novianty, 2021).

Menurut penelitian, terdapat beberapa faktor risiko pada kejadian Gagal Ginjal Akut (GGA) pada anak, yaitu keracunan dietilenglikol, riwayat transplantasi ginjal, sosio-demografi, kondisi prerenal, riwayat komorbid, penyakit sistemik, penyakit jantung bawaan, lama penggunaan alat ventilasi mekanis serta renal replacement therapy, dan faktor pediatrik. (Maghfiroh dkk, 2023).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kasus gangguan ginjal akut di Indonesia terkonfirmasi pada pertengahan 2022 dengan 1-2 kasus kematian per bulan dan meningkat menjadi 36 kasus pada Agustus 2022. Awalnya, Kementerian Kesehatan menduga kasus gagal ginjal akut disebabkan oleh virus dan bakteri. Namun, pertengahan September 2022, peneliti dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menemukan penyebab kematian akibat gangguan ginjal akut pada anak-anak di Gambia yaitu disebabkan oleh keracunan zat kimia yang ada dalam obat-obatan. Selanjutnya, Kemenkes mereview 78 pasien gagal ginjal akut dan lebih dari 50 persen meninggal dunia. Dari pasien-pasien tersebut, Kemenkes menemukan bahan kimia dalam ginjal seperti yang ditemukan oleh WHO. (Kontan, 2022).

Hingga 1 November 2022, 325 anak menjadi korban kasus gagal ginjal akut, 178 diantaranya

meninggal dunia. Gagal ginjal akut (*Acute Kidney Injury*) sebagian besar menyerang anak usia 0-5 tahun. Menurut Budi Gunadi Sadikin, kasus gagal ginjal akut tersebar di beberapa provinsi, diantaranya Sumatera Utara, daerah Jawa bagian barat, bagian timur, dan Sulawesi Selatan. Namun, Provinsi DKI Jakarta memiliki persebaran kasus paling tinggi. (Kompas, 2022).

Gejala yang dialami oleh pasien gagal ginjal akut bervariasi. Kemenkes mencatat, 202 pasien mengalami demam, 123 pasien kehilangan nafsu makan, kelelahan pada 119 pasien, 129 pasien mengalami mual, 120 pasien mengalami muntah, 108 pasien mengalami ISPA, 71 pasien tidak mampu memproduksi urine (anuria), 70 pasien mengalami diare, 62 pasien sakit perut, 51 pasien dehidrasi, dan 40 pasien mengalami penurunan volume urine (oliguria). Menurut Menkes, penyakit gagal ginjal akut berkembang cepat. Selain itu, kondisi perburukan pasien pun berlangsung cepat. Pasien masuk rumah sakit dan umumnya kondisi mereka turun drastis. (CNN, 2022).

Di tengah merebaknya kasus gagal ginjal akut, Menkes mengumumkan terdapat 102 obat sirup yang dikonsumsi oleh pasien gagal ginjal akut pada 21 Oktober 2022. Selanjutnya, Kemenkes mengambil sampel dari obat-obatan tersebut. Hasilnya, Menkes menemukan cemaran berbahaya dalam obat-obatan sirup. Cemaran itu berupa pelarut tambahan dalam dosis tinggi yaitu senyawa polietilen glikol, etilen glikol dan dietilen glikol. (CNN, 2022).

Berdasarkan temuan itu, Kemenkes memberikan instruksi untuk tidak mengonsumsi obat sirup untuk sementara agar tenaga kesehatan tidak meresepkan serta menjual obat sirup kepada masyarakat. Instruksi itu tertuang dalam surat edaran Nomor SR.01.05/III/3461/2022 tentang Kewajiban Penyelidikan Epidemiologi dan Pelaporan Kasus Gangguan Ginjal Akut Atipikal (*Atypical Progressive Acute Kidney Injury*) pada Anak. (Kontan, 2022).

Merebaknya kasus gagal ginjal akut membuat orang tua resah, terutama karena mereka terbiasa menggunakan obat-obatan sirup kepada bayi dan balita. Berselang dua pekan, Kemenkes kembali mengumumkan daftar obat yang dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Ada 156 obat sirup, cair dan obat tetes (drop) yang dinyatakan aman pada 4 November 2022. (Kompas, 2022).

Meskipun Kemenkes sudah memastikan keamanan dari 156 obat sirup, namun kasus gagal ginjal akut terlanjur menelan banyak korban. Kasus gagal ginjal akut pada anak juga menyisakan luka mendalam pada keluarga yang menjadi korban. Berbagai kisah pilu mewarnai perjalanan bayi dan balita pasien gagal ginjal akut, diantaranya bayi usia 20 bulan yang mengalami koma 30 hari. Pada 2 September 2022, seorang balita mengalami demam dan langsung dibawa ke rumah sakit (RS). Dokter memberikan tiga jenis obat sirup. Sebelumnya, pada Agustus 2022, balita tersebut juga mengonsumsi salah satu obat yang telah ditarik dari peredaran. Sejak mengalami demam, balita tersebut tidak bisa buang air kecil dan mengalami penurunan fungsi ginjal serta pembengkakan pada area tubuh. Awalnya, balita tersebut didiagnosis infeksi bakteri, namun pada 5 September 2022, dia dinyatakan menderita gagal ginjal akut. Setelah dirujuk ke dua RS, balita tersebut harus menjalani operasi pasang selang di perut untuk menjalani proses cuci ginjal dengan metode *Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis* (CAPD). Setelah menjalani tindakan, pembengkakan pada balita tersebut berangsur pulih, namun kembali memburuk dan mengalami sesak nafas dan kemudian koma selama sebulan akibat komplikasi

pada otaknya. (Tempo, 2022).

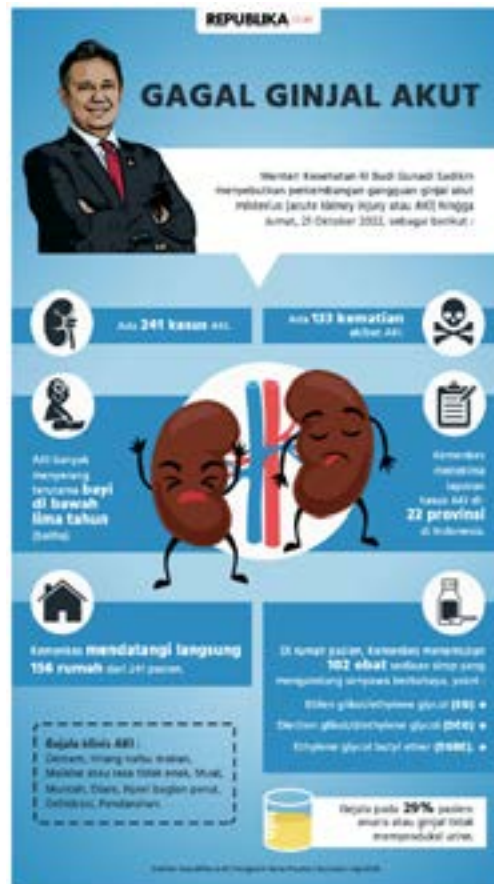
Penelitian berjudul, “Pengaruh Kandungan Obat Demam Sirup Terhadap Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak” menunjukkan Etilen Glycol (EG) dan Dietilen glycol (DEG) pada obat demam sirup dapat memengaruhi kerusakan pada ginjal jika pemberiannya melebihi ambang batas. Pembentukan metabolit asam oksalat dari etilen glikol dapat mengendap menjadi kristal kalsium oksalat monohidrat di lumen tubulus yang memicu terbentuknya batu ginjal dan cedera ginjal akut. Pada Dietilen Glikol, pembentukan metabolit asam 2-hidroksietoksiasetat (HEAA) memiliki efek toksik yang dihasilkan dari penumpukan HEAA sehingga menyebabkan asidosis dan kegagalan organ ginjal. (Salman, 2023).

Kasus cemaran pada obat sirup yang diduga menyebabkan penyakit gagal ginjal akut pada anak membuat banyak pihak menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Misalnya, keluarga korban menggugat beberapa perusahaan farmasi, distributor, BPOM serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Ada sembilan pihak yang digugat keluarga korban, yaitu PT Afi Farma, PT Universal Pharmaceutical Industries, PT Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, dan PT Mega Setia Agung Kimia, BPOM, dan Kemenkes. Adapun isi gugatan antara lain menuntut BPOM memperbaiki aturan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan meminta Kemenkes menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) agar korban yang dirawat dapat ditanggung biayanya serta menyita harta perusahaan farmasi dan distributor sebagai bentuk tanggung jawab atas kelalaiannya. (Kompas, 2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas Kesehatan. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. Selanjutnya, menurut UU No. 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak, dinyatakan bahwa “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang.” (Suprianto, 2022).

Tanggung jawab pemerintah terhadap kasus cemaran obat sirup dan gagal ginjal pada anak merupakan hak asasi bagi setiap anak. Tesis berjudul, “Tanggung Jawab Pemerintah Atas Tidak Terpenuhinya Hak Layanan Kesehatan di Masa Pandemi” mengungkapkan bahwa negara bertanggung jawab dalam melakukan pemenuhan hak asasi manusia termasuk hak atas layanan kesehatan, sekalipun dalam kondisi darurat negara. Jika dalam kasus terjadi kematian akibat tidak mendapat layanan kesehatan, maka negara gagal melaksanakan kewajibannya dan harus melakukan upaya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Negara perlu merumuskan bentuk pertanggungjawaban kepada warga negara yang menjadi korban akibat tidak mendapat layanan kesehatan. (Shokhikhah, 2022).

Penelitian terkait kasus cemaran obat sirup berjudul, “Efek Informasi Khasiat Madu terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Madu Pengganti Obat Sirup,” menunjukkan bahwa konsumen memiliki minat beli produk madu untuk menggantikan obat sirup. Madu dianggap lebih aman dan berkhasiat. Penelitian menunjukkan, konsumen akan memilih madu yang berkualitas meskipun harganya mahal. Hal ini terkait dengan fenomena penarikan obat sirup oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diduga dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal akut. (Pramelani, 2022).



**Gambar 1.** Infografis kasus gagal ginjal akut

Sumber: <https://visual.republika.co.id/berita/rkchn3428/infografis-gagal-ginjal-akut>

Mengamati berbagai berita yang berkembang di masyarakat, media massa memiliki peran yang besar dalam membentuk *frame* terkait kesehatan. Framing merupakan analisis untuk menggambarkan bagaimana realitas (peristiwa, aktor atau kelompok) dibingkai oleh media. (Eriyanto, 2015).

Penelitian berjudul, “Analisis Framing pada Pemberitaan tentang Polemik Obat Sirup Anak di Tribunnews.Com” menggunakan model framing Robert N. Entman menunjukkan bahwa pada media *online* Tribunnews.com, Kemenkes meminta apotek tidak meresepkan obat sampai pemerintah memberi pengumuman resmi, serta lima daftar obat sirup yang dilarang peredarannya oleh BPOM. Raminya berita mengenai gangguan ginjal akut progresif atipikal di Indonesia yang menyebabkan kematian pada anak dibawah umur lima tahun terus mengalami perburukan. Selain itu, Tribunnews.com menyatakan BPOM telah menetapkan persyaratan bahwa semua produk obat sirup untuk anak maupun dewasa, tidak diperbolehkan menggunakan EG dan DEG. Melalui penelitian ini diharapkan media *online* Tribunnews.com dapat selalu menyampaikan pesan dan pemberitaan yang positif mengenai obat sirup sehingga tidak terjadi polemik dan mampu menumbuhkan optimisme pada masyarakat. (Dara dkk, 2023).

Penelitian dengan metode analisis framing berjudul, “Citra Kepemimpinan Menteri Kesehatan dalam



Penanganan Permasalahan Kesehatan di Indonesia (Framing Budi Gunadi Sadikin pada Pemberitaan di Detik.com Periode November 2022)” menunjukkan bahwa kepemimpinan transformational Budi Gunadi Sadikin dalam pemberitaan memiliki pengaruh yang ideal, dapat dilihat dari kredibilitas menteri kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam melakukan kerja sama. *Inspiration* dapat dilihat dari peran Budi Gunadi Sadikin dalam memberikan solusi untuk menghadapi masalah perkembangan omicron, gagal ginjal akut pada anak, penanganan obat sirup bermasalah, dan penanggulangan pemberantasan tuberculosis. *Intellectual stimulation* dapat dilihat dari berbagai data yang disajikan oleh menteri kesehatan dan *individualized consideration* yang dilihat dari kemampuan menteri kesehatan menjangkau korban obat sirup dan gagal ginjal akut di rumah sakit. (Hidayati dkk, 2022).

Media, dalam hal ini memiliki kemampuan untuk menyeleksi dan menonjolkan fakta terkait suatu isu. Melihat pentingnya peran pemerintah dalam mengatasi isu-isu kesehatan, penulis tertarik meneliti tentang, “Frame Tanggung Jawab Pemerintah dalam Berita tentang Cemaran Obat Sirup dan Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak.”

## Metode

Artikel ini dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif guna mengkaji *frame* tanggung jawab pemerintah dalam berita tentang cemaran obat sirup dan kasus gagal ginjal akut pada anak.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Anggapan dari paradigma konstruktivisme menjelaskan bahwa kebenaran dari realitas sosial merupakan hasil konstruksi sosial dan kebenaran tersebut bersifat relatif. Kualitatif merupakan pendekatan penelitian untuk mencari pengertian, konsep, karakteristik, dan deskripsi mengenai suatu fenomena yang bersifat alami dan holistik. Pendekatan kualitatif juga mampu menggali makna dan menjadikannya naratif. Kaitannya dengan penelitian adalah bagaimana berita kesehatan mengonstruksi tanggung jawab pemerintah dalam menangani kasus cemaran obat sirup dan gagal ginjal akut pada anak.

Untuk mengkaji pembentukan *frame* tanggung jawab pemerintah dalam berita terkait kasus gagal ginjal dan cemaran obat sirup, penulis akan menganalisis berita kesehatan terkait kasus gagal ginjal pada anak dan cemaran obat sirup dengan menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman.

Framing merupakan pendekatan untuk mengetahui cara pandang atau perspektif jurnalis ketika melakukan seleksi isu dalam menulis berita. Analisis ini mencermati seleksi dan penonjolan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektif media tersebut. (Sobur, 2015)

Menurut Eriyanto (2015), framing merupakan analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (peristiwa, aktor atau kelompok) dibingkai oleh media. Pembingkaiian tersebut dibuat melalui proses kontruksi.

Penulis menggunakan analisis framing model Robert N. Entman untuk menggambarkan bagaimana media melakukan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas. Framing memberi tekanan pada bagaimana teks ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh media.

Penonjolan fakta dalam framing membuat informasi terlihat lebih jelas sehingga lebih mudah diterima dan diingat oleh khalayak. (Eriyanto, 2015)

Entman membagi framing media kedalam empat perangkat, yaitu: 1) pendefinisian masalah (*define problems*) untuk melihat bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat; 2) memperkirakan masalah atau sumber masalah (*diagnose causes*) untuk melihat apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah; 3) membuat keputusan moral (*make moral judgement*) untuk melihat nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah; 4) menekankan penyelesaian (*treatment recommendation*) untuk melihat penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan. (Eriyanto, 2015)

Analisis framing merupakan metode penelitian yang mengkaji mengenai perspektif atau sudut pandang wartawan dalam menyeleksi suatu isu dan mengkonstruksi peristiwa tersebut menjadi berita yang dikemudian disajikan kepada khalayak.

Penulis menganalisis berita mengenai kasus gagal ginjal akut pada anak dan cemaran obat sirup di media *online* Kompas.com dan Tempo.co. Tiga artikel pada Kompas.com dan tiga artikel pada Tempo.co dipilih terkait pemberitaan mengenai tanggung jawab pemerintah terhadap kasus tersebut, sebagai berikut:

**Table 1.** Sampel Penelitian

Tanggal	Media Online	Judul Berita
29 Maret 2023	Kompas.com	Wamenkes Janji Bakal Sederhanakan Mekanisme Berobat Jalan Pasien Gagal Ginjal Akut
27 Maret 2023	Kompas.com	Usai Saling Lempar, Kini Persoalan Santunan Gagal Ginjal Akut Dibahas Empat Kementerian
9 Februari 2023	Kompas.com	Gagal Ginjal Muncul Lagi, Tim Advokasi Minta Kemenkes-BPOM Tanggungjawab
7 Februari 2023	Liputan6.com	Komisi IX DPR Minta Kemenkes Tanggung Biaya Rawat Pasien Suspek Gagal Ginjal Akut
28 Oktober 2022	Liputan6.com	Komnas HAM Sebut Harus Ada yang Bertanggung Jawab untuk Kasus Gagal Ginjal Akut
25 Oktober 2022	Liputan6.com	Ombudsman Duga Ada Potensi Maladministrasi Kemenkes dan BPOM di Kasus Gagal Ginjal Akut

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer, yaitu mengumpulkan dokumentasi berita terkait kasus gagal ginjal pada anak dan cemaran obat sirup terkait tanggung jawab pemerintah di media *online* Kompas.com dan Tempo.co. Berikutnya, sumber data sekunder, yaitu penelusuran studi pustaka yang berkaitan dengan *frame* terkait tanggung jawab pemerintah terhadap kasus gagal ginjal pada anak dan cemaran obat sirup.



Pada teknik analisis data, penulis menjabarkannya sebagai berikut:

1. menganalisis berita tentang kasus gagal ginjal dan cemaran obat sirup di media Kompas.com dan Tempo.co, dengan empat perangkat framing Robert N. Entman, yang terdiri dari empat struktur, yaitu *define problems*, *diagnose causes*, *make moral judgements*, dan *treatment recommendations*;
2. menganalisis *frame* berita terkait gagal ginjal yang dialami anak-anak;
3. menganalisis *frame* berita terkait cemaran obat sirup;
4. menganalisis perbedaan *frame* pemberitaan kedua media terkait tanggung jawab Pemerintah terhadap kasus gagal ginjal dan cemaran obat sirup.

## Hasil Dan Pembahasan

Kompas.com merupakan salah satu pionir media *online* di Indonesia ketika pertama kali hadir di internet pada 14 September 1995 dengan nama *Kompas online*. Pada 29 Mei 2008, portal berita ini me-*rebranding* dirinya menjadi Kompas.com, merujuk kembali pada brand *Kompas* yang selama ini dikenal selalu menghadirkan jurnalisme yang memberi makna. Kanal-kanal berita ditambah. Produktivitas sajian berita ditingkatkan demi memberikan sajian informasi yang *update* dan aktual kepada para pembaca. *Rebranding* Kompas.com ingin menegaskan bahwa portal berita ini ingin hadir di tengah pembaca sebagai acuan bagi jurnalisme yang baik di tengah derasnya aliran informasi yang tak jelas kebenarannya.

Liputan6.com merupakan portal berita yang terdaftar dan sudah diverifikasi di Dewan Pers Indonesia. Informasi terbaru dan akurat yang disajikan Liputan6.com menitikberatkan pada akurasi dan ketajaman berita dengan sumber informasi yang terpercaya.

Pemilihan kedua media *online* tersebut untuk memahami *frame* media terkait tanggung jawab pemerintah terhadap kasus gagal ginjal pada anak dan cemaran obat sirup. Berikut ini merupakan analisis berita di Kompas.com dan Liputan6.com:

## Analisis Berita Pertama



**Gambar 2.** Berita Pertama

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/29/06565701/wamenkes-janji-bakal-sederhanakan-mekanisme-berobat-jalan-pasien-gagal>

### ***Define Problem***

Dalam berita berjudul, “Wamenkes Janji Bakal Sederhanakan Mekanisme Berobat Jalan Pasien Gagal Ginjal Akut”, mendefinisikan masalah yaitu banyak pasien rawat jalan gagal ginjal akut yang mengalami kesulitan dalam menjalani pengobatan. Hal tersebut tertulis pada paragraf dua, “Banyaknya pasien rawat jalan gagal ginjal akut yang harus bolak-balik RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo.”

Definisi masalah tersebut diperjelas dalam paragraf tiga, yaitu, “Dalam satu kali kunjungan ke rumah sakit, pasien hanya bisa mendapatkan penanganan di satu poli.”

Dalam paragraf tiga tersebut, Kompas.com juga mendefinisikan masalah lain, yaitu tingkat keparahan pasien diakibatkan oleh efek samping obat sebagai berikut, “Padahal, para pasien harus mendapat penanganan di dua hingga delapan poli, tergantung tingkat keparahan akibat efek samping obat.”

### ***Diagnose Causes***

Dalam paragraf empat, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menyatakan sumber masalah sebagai berikut, “Saya menyoroti masalah klinis. Masalah klinisnya nanti akan kita bereskan, kenapa ini harus dua kali kontrol poli dan sebagainya.” Melalui pernyataan Wamenkes, Kompas.com menyebutkan mekanisme kontrol yang dijalani oleh pasien gagal ginjal akut sebagai sebuah sumber dari permasalahan.

### ***Moral Judgements***

Keputusan moral dalam berita tersebut yang disajikan Kompas.com yaitu sikap Wamenkes yang ingin memudahkan beban korban gagal ginjal akut dalam menjalani pengobatan.

### ***Treatment Recommendation***

Adapun penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu:

- a. menyederhanakan mekanisme kontrol yang dijalani oleh pasien ke poli;
- b. membentuk tim klinis bagi pasien rawat jalan gagal ginjal akut;

- c. memudahkan masalah administrasi maupun mekanisme pengobatan;
- d. mengkaji kemungkinan konsultasi jarak jauh agar orangtua korban tidak harus bolak-balik ke rumah sakit.

### **Analisis Berita Kedua**



**Gambar 3.** Berita Kedua

Sumber: Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/27/22335341/usai-saling-lempar-kini-persoalan-santunan-gagal-ginjal-akut-dibahas-empat>

#### ***Define Problem***

Dalam berita berjudul, “Usai Saling Lempar, Kini Persoalan Santunan Gagal Ginjal Akut Dibahas Empat Kementerian”, mengangkat ketidakjelasan santunan korban gagal ginjal akut sebagai topik permasalahan. Masalah lain yang juga diangkat dalam berita tersebut adalah rencana Pemerintah untuk menggunakan anggaran lain untuk memberikan bantuan maupun santunan kepada korban gagal ginjal akut.

#### ***Diagnose Causes***

Kompas.com menyebutkan bahwa akar masalah dari ketidakjelasan santunan yaitu karena Kemensos menyatakan tidak memiliki alokasi dana santunan untuk korban gagal ginjal akut akibat anggaran Kemensos yang mengalami penurunan hingga 300 milyar.

Akar masalah lainnya, yaitu Kemenkes tidak memiliki tugas dan fungsi secara langsung untuk menyalurkan bantuan tersebut.

#### ***Moral Judgements***

Keputusan moral dalam analisis berita kedua disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bahwa Pemerintah akan menggunakan anggaran dari pos lain.

#### ***Treatment Recommendation***

Rekomendasi penyelesaian masalah yang disampaikan Kompas.com yaitu mengenai pembahasan santunan oleh Kemenkes, Kemenkeu, Kemensos dan Kemenko PMK. Adapun pembahasan santunan mencakup mekanisme penyaluran dan kriteria penerima.

## Analisis Berita Ketiga



**Gambar 4.** Berita Ketiga

Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/09/19162421/gagal-ginjal-muncul-lagi-tim-advokasi-minta-kemenkes-bpom-tanggung-jawab>

### ***Define Problem***

Definisi masalah pada analisis berita ketiga, yaitu mengenai penilaian dari Tim Advokasi untuk Kemanusiaan mengenai peran dan tanggung jawab dari Kementerian Kesehatan serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Menurut Tim Advokasi untuk Kemanusiaan, Kementerian Kesehatan dan BPOM harus bertanggung jawab secara pidana maupun perdata atas kasus gagal ginjal akut pada anak. Hal ini ditampilkan dan dijelaskan dalam judul dan *lead* berita.

### ***Diagnose Causes***

Penyebab masalahnya dijelaskan dalam berita bahwa Tim Advokasi untuk Kemanusiaan menilai Kementerian Kesehatan dan BPOM lalai dalam memberikan izin terkait beredarnya jenis obat-obatan yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak.

Hal ini dijelaskan oleh Julius Ibrani, anggota tim dalam paragraf tiga, “Perintahkan dia untuk mempertanggungjawabkan, kamu sudah dari tahun lalu dikasih tahu, lalai, korban jatuh terus, ini pidana. Ada kelalaian yang disengaja,” kata Julius dalam sebuah diskusi, Kamis (9/2/2023).

### ***Moral Judgements***

Keputusan moral dalam analisis berita ketiga disampaikan oleh Julius Ibrani selaku anggota Tim Advokasi untuk Kemanusiaan, yaitu mengingatkan andil Kemenkes dan BPOM agar lebih ketat dalam mengeluarkan izin untuk produsen obat-obatan. Julius menilai ada indikasi kelalaian yang disengaja karena adanya kemudahan dalam memberikan SK izin peredaran obat.

Penjelasan tersebut ada di dalam paragraf 6 dan 8, sebagai berikut: “Bukan berarti kemudian dia (Kemenkes dan BPOM) juga cuci dosa dengan menunjukkan wajah garangnya kepada swasta. Dia bertanggung jawab, SK dia yang dipegang swasta,” ujar Julius. (Paragraf 6)

“Apakah ada indikasi-indikasi kelalaian yang disengaja yang berpotensi pada, misalnya, jangan-jangan ada pungli di situ, ada katabelece di situ, jadi obat yang sebenarnya racun ini diberikan SK, diberikan izin edar segala macam,” kata Julius. (Paragraf 8)

### ***Treatment Recommendation***

Kompas.com menyampaikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam analisis berita ketiga, sebagai berikut:

- a. Kemenkes dan BPOM lebih ketat dalam mengeluarkan SK terkait izin pedaran obat-obatan.
- b. Mengusut dan mengawasi proses penerbitan izin edar obat karena dikhawatirkan ada pelanggaran di dalam prosesnya.

### **Analisis Berita Keempat**



**Gambar 5.** Berita Keempat

Sumber: Sumber: <https://www.liputan6.com/health/read/5200154/komisi-ix-dpr-minta-kemenkes-tanggung-biaya-rawat-pasien-suspek-gagal-ginjal-akut>

### ***Define Problem***

Definisi masalah dalam berita disampaikan oleh Liputan6.com bahwa hingga 31 Oktober 2022 ada 323 anak mengalami gagal ginjal dan 190 anak meninggal yang diakibatkan karena cemaran Etilen Glikol (EG) melebihi ambang batas yang terkandung pada obat sirup. Komisi IX DPR meminta Kemenkes untuk menanggung biaya perawatan pasien anak suspek gagal ginjal.

Hal ini terdapat dalam paragraf 2, “Terkait pasien suspek gagal ginjal akut pada anak, Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menanggung sepenuhnya biaya perawatan anak 7 tahun tersebut.”

### ***Diagnose Causes***

Permintaan Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto tersebut merujuk dari hasil rapat Komisi IX DPR bersama Kemenkes terkait penanganan kasus gagal ginjal pada anak.

Hal ini terdapat dalam paragraf 4, “Kemenkes juga harus menanggung seluruh biaya perawatan (pasien suspek ginjal akut) sampai sembuh. Ini merupakan komitmen Kementerian Kesehatan yang harus dilaksanakan, sesuai kesimpulan rapat dengan Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.”

### ***Moral Judgements***

Kasus gagal ginjal pada anak sangat memprihatinkan. Mengingat data dari Komisi IX DPR menyebutkan hingga 31 Oktober 2022 ada 323 anak mengalami gagal ginjal dan 190 anak meninggal.

DPR mendesak Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas mengenai kasus gagal ginjal dan mendesak Kemenkes untuk menanggung biaya perawatan dan memberikan santunan kepada korban gagal ginjal.

Hal ini terdapat dalam paragraf 9, “Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Kurniasih Mufidawati pada Rabu (25/1/2023) menyatakan, Kemenkes akan memberikan biaya pengobatan terhadap seluruh korban gagal ginjal akut. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Tim Advokasi Untuk Kemanusiaan terkait korban gagal ginjal akut pada anak.”

### ***Treatment Recommendation***

Rekomendasi masalah yang disampaikan oleh Liputan6.com dalam berita, sebagai berikut:

- a. Komisi IX DPR mendesak Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan kasus gagal ginjal pada anak. Pemerintah harus bisa menjamin kesehatan, keamanan obat, dan makanan bagi rakyat.
- b. Komisi IX DPR mendesak Kemenkes untuk membiayai perawatan dan pengobatan, serta memberikan santunan kepada para korban.

### **Analisis Berita Kelima**



**Gambar 6.** Berita Kelima

Sumber: Sumber: <https://www.liputan6.com/health/read/5110080/komnas-ham-sebut-harus-ada-yang-bertanggung-jawab-untuk-kasus-gagal-ginjal-akut>

### ***Define Problem***

Dalam Berita berjudul, “Komnas HAM sebut Harus Ada yang Bertanggung Jawab untuk Kasus Gagal Ginjal Akut”. Komnas HAM menyesalkan peristiwa kasus gagal ginjal akut yang menimpa ratusan anak Indonesia, dan lebih dari separuh anak yang mengalami kondisi itu meninggal dunia.

### ***Diagnose Causes***

Peristiwa ini sebagai kejadian yang luar biasa, harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini (kata, Wakil Ketua Komnas HAM RI Munafrizal Manan, Kamis, 27 Oktober 2022, dalam konferensi pers bersama BPOM RI di Jakarta).

Kata Munfrizal, sangat prihatin atas peristiwa gagal ginjal akut yang merengut korban anak-anak.



### ***Moral Judgements***

Nilai moral yang terkandung dalam berita, disampaikan oleh Munfrizal, bahwa dalam kondisi perang saja, anak-anak itu perlu dilindungi, apalagi dalam kondisi normal. Pihak Komnas HAM melihat ada hak anak yang harus diperhatikan dalam kasus gagal ginjal akut yakni hak hidup, hak kesehatan, dan hak jaminan sosial.

Selain itu, Munafrizal sependapat dengan Presiden Joko Widodo, agar biaya perawatan mereka di rumah sakit agar digratiskan. Serta, ada suatu wacana bagi yang meninggal karena gagal ginjal akut diharapkan ada kebijakan untuk memberikan santunan dan kerohiman pada mereka.

### ***Treatment Recommendation***

Rekomendasi penyelesaian masalah dalam berita tersebut, yakni:

- a. Komnas HAM dan BPOM melakukan koordinasi untuk memastikan pemenuhan hak di atas tersebut.
- b. Menurut Munafrizal, Pemerintah dan BPOM harus berupaya maksimal agar kejadian serupa tidak berulang dan korban meninggal bertambah. Serta, harus ditemukan penyebab pasti meninggalnya anak-anak tersebut.
- c. Munafrizal pun menyatakan agar kejadian gagal ginjal tersebut tidak terulang, menyarankan tata kelola sistem pengawasan obat dan makanan agar dibuat lebih komprehensif.
- d. BPOM sendiri juga agar kedepannya bisa lebih maksimal dan super ketat dalam melakukan pengawasan obat dan makanan.
- e. BPOM juga dalam menyampaikan informasi ke publik selalu menyampaikan *update* secara transparan.

### **Analisis Berita Keenam**



**Gambar 7.** Berita Keenam

Sumber: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5106719/ombudsman-duga-ada-potensi-maladministrasi-kemenkes-dan-bpom-di-kasus-gagal-ginjal-akut>

### ***Define Problem***

Robert Na Endi Jaweng sebagai anggota Ombudsman RI menduga terjadinya potensi

maladminisitrasi data di Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada kasus gagal ginjal akut pada anakan yang disebabkan oleh obat sirup untuk anak (selasa, 2510-2022)

### ***Diagnose Causes***

Selain itu, diharapkan kejelasan kerja dan peran (fungsi) dari Kementerian Kesehatan dengan BPOM. Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan dalam hal penyusunan kebijakan, perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan serta kefarmasian hingga alat kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. (kata Robert)

BPOM memiliki kewenangan dan tanggung jawab terkait menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua elemen perintah (baik Kementerian Kesehatan dan BPOM, ini yang akan menjadi lebih jelas dalam objek penelitian dalam kasus gagal ginjal akut.

### ***Moral Judgements***

Dalam berita di atas, Robert Na Endi Jaweng memberikan suatu permintaan, bahwa Pemerintah untuk memberikan data yang valid dan real perbulannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan ombudsman memiliki gambaran yang komprehensif yang lengkap terkait dengan data.

Selain itu, Robert menyatakan, bahwa berapa pun data angka yang ada, nyawa tetaplah sesuatu yang berarti.

### ***Treatment Recommendation***

Berikut ini rekomendasi penyelesaian masalah yang disajikan dalam berita.

- a. Pemerintah harus benar memberikan data yang valid dan *real*, agar Ombudsman dan masyarakat memiliki gambaran yang komprehensif yang terkait dengan data.
- b. Kementerian Kesehatan RI dan BPOM harus memahami fungsi dan perannya masing-masing sesuai tugas yang sudah ditentukan.
- c. Kelengkapan data yang disajikan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, diharapkan nantinya oleh Pemerintah agar terhindarkan dari dugaan potensi maladministrasi data.

### ***Frame berita terkait gagal ginjal yang dialami anak-anak dan cemaran obat sirup***

Menurut Entman, teori framing menjelaskan bagaimana media memberikan gambaran bagi audiens untuk menginterpretasikan peristiwa. Hal penting dalam framing adalah bagaimana pemilihan isu atau aspek dari realitas yang membuatnya lebih menonjol dalam teks dengan sedemikian rupa sehingga bisa menunjukkan definisi masalah tertentu, penyebab masalah, evaluasi moral, dan rekomendasi penyelesaian masalah. (Scheufele, 1999).

Berdasarkan hasil analisis, Kompas.com dan Liputan6.com menonjolkan isu terkait fakta-fakta mengenai gagal ginjal akut dan cemaran obat sirup sebagai berikut:

Kompas.com membingkai pasien gagal ginjal akut mengalami kesulitan dalam menjalani pengobatan, hal ini terjadi karena mekanisme rawat jalan yang rumit, misalnya pasien hanya bisa mendapatkan penanganan di satu poli, padahal pasien harus mendapatkan penanganan di dua hingga delapan poli, tergantung tingkat keparahan akibat efek samping obat. Serupa dengan Kompas.com, Liputan6.com juga menampilkan Pemerintah tidak bertanggung jawab dalam hal biaya perawatan pasien. Komisi IX DPR meminta Kemenkes untuk menanggung biaya perawatan pasien anak suspek gagal ginjal.

Dalam hal santunan, Kompas.com membingkai korban gagal ginjal akut dalam kondisi nasib yang tidak jelas. Hal ini lantaran, Kemensos menyatakan tidak memiliki dana untuk dibagikan kepada korban, sementara Kemenkes menyatakan tidak memiliki tugas dan fungsi untuk menyalurkan dana tersebut. Selanjutnya, Kemensos, Kemenkes Kemenko PMK dan Kemenkeu membahas permasalahan tersebut. Sejalan dengan Kompas.com, Liputan6.com menampilkan tanggapan Komnas HAM yang menuntut pertanggungjawaban atas kasus yang menimpa ratusan anak tersebut.

Isu selanjutnya yang diangkat Kompas.com, yaitu terkait kasus gagal ginjal akut yang kembali muncul pada Februari 2023. Kompas.com menampilkan pendapat Tim Advokasi untuk Kemanusiaan yang meminta Kemenkes dan BPOM untuk bertanggung jawab secara pidana maupun perdata terhadap para korban.

Menurut Wakil Ketua Komnas HAM RI Munafrizal Manan, bahwa dalam kondisi perang saja, anak-anak itu perlu dilindungi, apalagi dalam kondisi normal. Pihak Komnas HAM melihat ada hak anak yang harus diperhatikan dalam kasus gagal ginjal akut yakni hak hidup, hak kesehatan, dan hak jaminan sosial.

Selain itu, Munafrizal sependapat dengan Presiden Joko Widodo, agar biaya perawatan mereka di rumah sakit agar digratiskan. Serta, ada suatu wacana bagi yang meninggal karena gagal ginjal akut diharapkan ada kebijakan untuk memberikan santunan dan pada korban.

Jika, Kompas.com menyoroti hak-hak yang harus dipenuhi untuk anak-anak, Liputan6.com menonjolkan isu dugaan Ombudsman RI atas terjadinya potensi maladminisitrasi data di Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada kasus gagal ginjal akut pada anakan yang disebabkan oleh obat sirup untuk anak.

Ombudsman juga menuntut kejelasan kerja dan peran (fungsi) dari Kementerian Kesehatan dengan BPOM. Kementerian Kesehatan memiliki kewenangan dalam hal penyusunan kebijakan, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan, dan juga pencegahan dan pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan serta kefarmasian hingga alat kesehatan. Selain itu, Kementerian Kesehatan melakukan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan. Sementara, BPOM, memiliki kewenangan dan sekaligus tanggung jawab terkait menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait kasus cemarkan obat sirup, Kompas.com menampilkan pendapat Tim Advokasi untuk Kemanusiaan yang berpendapat bahwa Kementerian Kesehatan dan BPOM lalai dalam memberikan

izin terkait beredarnya jenis obat-obatan yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak. Apalagi kasus gagal ginjal akut kembali terulang pada Februari 2023.

Kompas.com menegaskan andil Kemenkes dan BPOM agar lebih ketat dalam mengeluarkan izin untuk produsen obat-obatan. Julius Ibrani menilai ada indikasi kelalaian yang disengaja karena adanya kemudahan dalam memberikan SK izin peredaran obat.

“Bukan berarti kemudian dia (Kemenkes dan BPOM) juga cuci dosa dengan menunjukkan wajah garangnya kepada swasta. Dia bertanggung jawab, SK dia yang dipegang swasta.”

Julius juga mempertanyakan apakah ada indikasi-indikasi kelalaian yang disengaja, jangan-jangan ada pungutan liar, jadi obat yang sebenarnya racun ini diberikan SK, diberikan izin edar.

Isu yang disoroti oleh Liputan6.com bahwa hingga 31 Oktober 2022, 323 anak mengalami gagal ginjal dan 190 anak meninggal akibat cemaran Etilen Glikol (EG) melebihi ambang batas yang terkandung pada obat sirup.

### **Perbandingan *Frame* Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Kasus Gagal Ginjal Akut dan Cemaran Obat Sirup di Kompas.com dan Liputan6.com**

Eriyanto (2012) menjelaskan mengenai efek framing ke dalam tiga bagian:

- a. Menonjolkan Aspek Tertentu dan Mengaburkan Aspek Lain Framing umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas, dalam penulisan sering disebut sebagai fokus, berita secara sadar atau tidak diarahkan pada aspek tertentu, akibatnya ada aspek lainnya yang tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Dalam membingkai tanggung jawab pemerintah terhadap kasus gagal ginjal, Kompas.com menampilkan Pemerintah yang saling melempar tanggung jawab terkait santunan terhadap korban gagal ginjal akut. Pemerintah berencana menggunakan anggaran lain untuk memberikan bantuan maupun santunan kepada korban. Kemenkes, Kemenkeu, Kemensos dan Kemenko PMK. Keempat kementerian membahas santunan untuk korban, mencakup mekanisme penyaluran dan kriteria penerima namun tidak ada hasil bahasan yang ditampilkan dalam berita. Sementara itu, Liputan6.com menonjolkan aspek tuntutan terhadap biaya perawatan korban kasus gagal ginjal akut pada anak, dan dugaan maladministrasi Kemenkes dan BPOM di kasus gagal ginjal.

- b. Menampilkan Sisi Tertentu dan Melupakan Sisi Lain Dengan menampilkan aspek tertentu dalam suatu berita menyebabkan aspek yang lainnya yang penting dalam memahami realitas tidak mendapatkan liputan yang memadai dalam berita.

Sisi yang ditampilkan oleh Kompas.com yaitu terkait santunan korban, mekanisme pengobatan, tuntutan terkait pengetatan aturan izin edar obat sirup dan agar Kemenkes mengusut dan mengawasi proses penerbitan izin edar obat karena dikhawatirkan ada pelanggaran di dalam prosesnya. Sementara, Liputan6.com menampilkan sisi tuntutan Komnas HAM bahwa harus ada yang bertanggung jawab untuk kasus gagal ginjal akut.

- c. Menampilkan Aktor Tertentu dan Menyembunyikan Aktor Lainnya. Berita seringkali memfokuskan pemberitaan pada aktor tertentu, ini tentu tidak salah, tapi efek yang segera terlihat adalah

memfokuskan pada satu pihak atau aktor tertentu dan menyebabkan aktor lainnya yang mungkin lebih relevan serta penting dalam pemberitaan menjadi tersembunyi.

Dalam pemberitaan terkait kasus gagal ginjal dan cemaran obat sirup, aktor yang ditampilkan oleh Kompas.com antara lain Kemenkes, Kemenkeu, Kemensos dan Kemenko PMK yang membahas santunan bagi korban gagal ginjal akut. Kompas menampilkan pernyataan Kemenkes melalui Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, bahwa Kemenkes telah melakukan pertemuan bersama tiga kementerian untuk membahas santunan. Namun, dia menyatakan bahwa Kemenkes tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan santunan. “Kemarin terakhir sabtu masih pertemuan antara kita, Kemensos, Kemenkeu, dan Kemenko PMK untuk mekanismenya,” ucap Nadia. “Karena kan sebenarnya Kemenkes itu tidak punya tusi (tugas dan fungsi) untuk memberikan santunan ya, jadi kan bukan tugas kita. Nah, tapi Kemensos masih mempertimbangkan. Seperti itu,” imbuh dia. Aktor kedua yang ditampilkan yaitu pernyataan Muhadjir Effendy bahwa alokasi dana santunan sedang diusahakan. “Sedang diupayakan menggunakan alokasi dana yang lain,” kata Muhadjir Effendy saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/3/2023). Terakhir, pernyataan Risma terkait keberatan mengenai dana santunan untuk korban gagal ginjal akut. “Kami ada anggarannya. Duit dari mana anggarannya? Kalau itu, nanti harus cuci darah. Itu kan tidak bisa sekali, kan harus berkali kali. Duit dari mana kami, berat biayanya,” kata Risma saat ditemui di Gedung Kemensos, Jakarta Pusat, Senin (21/3/2023).

Kompas.com juga menampilkan pernyataan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono yang berjanji akan menyederhanakan mekanisme kontrol yang dijalani oleh pasien ke poli, membentuk tim klinis bagi pasien rawat jalan gagal ginjal akut, memudahkan masalah administrasi maupun mekanisme pengobatan dan mengkaji kemungkinan konsultasi jarak jauh agar orangtua korban tidak harus bolak-balik ke rumah sakit. Kompas.com juga menampilkan pernyataan Tim Advokasi untuk Kemanusiaan menuntut Kementerian Kesehatan dan BPOM harus bertanggung jawab secara pidana maupun perdata atas kasus gagal ginjal akut pada anak.

Sementara, Liputan6.com menampilkan *actor* dalam pemberitaan terkait kasus gagal ginjal akut dan cemaran obat sirup, yaitu Komisi IX DPR, Komnas HAM, dan Ombudsman.

Komisi IX DPR yang mendesak Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas dalam menyelesaikan kasus gagal ginjal dan mendesak Kemenkes untuk menanggung biaya perawatan, pengobatan dan memberikan santunan kepada korban gagal ginjal, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan Kurniasih Mufidawati yang menyatakan, Kemenkes akan memberikan biaya pengobatan terhadap seluruh korban gagal ginjal akut, Komnas HAM dan BPOM melakukan koordinasi untuk memastikan pemenuhan hak hidup, hak kesehatan, dan hak jaminan sosial. Menurut Komnas HAM, pemerintah dan BPOM harus berupaya maksimal agar kejadian serupa tidak berulang dan korban meninggal bertambah serta harus ditemukan penyebab pasti meninggalnya anak-anak tersebut. Komnas HAM pun menyatakan agar kejadian gagal ginjal tersebut tidak terulang, menyarankan tata kelola sistem pengawasan obat dan makanan agar dibuat lebih komprehensif. BPOM sendiri juga agar kedepannya bisa lebih maksimal dan super ketat dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. BPOM juga

dalam menyampaikan informasi ke publik selalu menyampaikan *update* secara transparan. Ombudsman meminta pemerintah untuk memberikan data yang valid dan real perbulannya. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki gambaran yang komprehensif yang lengkap terkait dengan data karena berapa pun data angka yang ada. Kelengkapan data yang disajikan oleh Kementerian Kesehatan dan BPOM, diharapkan nantinya oleh pemerintah agar terhindarkan dari dugaan potensi maladministrasi data. Kementerian Kesehatan RI dan BPOM harus memahami fungsi dan perannya masing-masing sesuai tugas yang sudah ditentukan.

## Simpulan

*Frame* yang dibentuk oleh Kompas.com dan Liputan6.com dalam pemberitaan terkait tanggung jawab pemerintah dalam menangani kasus gagal ginjal akut dan cemaran obat, yaitu pemerintah digambarkan tidak bertanggung jawab dalam menangani kasus gagal ginjal dan gagal mencegah terulangnya kasus gagal ginjal akut.


Kompas.com membentuk *frame* bahwa pemerintah saling melempar tanggung jawab terkait santunan terhadap anak korban gagal ginjal akut. Belum ada dana santunan pasti yang diberikan oleh Pemerintah. Apakah akan diberikan santunan oleh Kemenkes, Kemenkeu, Kemensos, atau Kemenko PMK. Adapun membahas santunan untuk korban, mencakup mekanisme penyaluran dan kriteria penerima. Berikutnya, Kompas.com menampilkan mengenai penyederhanaan mekanisme rawat jalan bagi korban anak gagal ginjal akut, membentuk tim klinis bagi pasien anak rawat jalan gagal ginjal akut, memudahkan masalah administrasi maupun mekanisme pengobatan dan mengkaji kemungkinan konsultasi jarak jauh untuk memudahkan orangtua korban, tuntutan kepada Kemenkes dan BPOM lebih ketat dalam mengeluarkan SK terkait izin pengedaran obat-obatan, dan Kemenkes wajib mengusut dan mengawasi proses penerbitan izin edar obat karena dikhawatirkan ada pelanggaran.


Liputan6.com membentuk *frame* bahwa Pemerintah tidak bertanggung jawab untuk biaya perawatan, pengobatan, dan santunan terhadap pasien anak korban gagal ginjal akut. Pemerintah juga ditampilkan tidak bertanggung jawab dalam pengawasan obat-obatan yang beredar di masyarakat, adanya potensi maladministrasi, dan tidak memberikan informasi yang valid dan transparan kepada masyarakat. Kementerian Kesehatan dan BPOM dianggap lalai karena kasus gagal ginjal Kembali terulang pada Februari 2023. Pemerintah juga dianggap tidak mampu dalam menjamin hak hidup, hak kesehatan, dan hak jaminan sosial.


Rekomendasi yang disampaikan oleh Kompas.com dan Liputan6.com terkait kasus gagal ginjal akut pada anak dan cemaran obat sirup adalah pemerintah harus bertanggung jawab kepada korban terkait pengobatan, perawatan dan santunan. Pemerintah juga harus memperketat izin edar obat sirup agar kasus gagal ginjal akut tidak terulang kembali.



## ID ORCID

Umi Septia Rahayu  <https://orcid.org/0009-0006-3698-5974>

Rohmadtika Dita  <https://orcid.org/0009-0002-1542-3949>

Syafril Tahar  <https://orcid.org/0009-0000-0728-9669>

## Daftar Pustaka

CNNIndonesia.com. (Mei, 2022). <https://www.cnnindonesia.com/news/20220524144937-4-341507/pasca-pandemi-muncul-3-penyakit-baru-yang-resahkan-dunia>.

CNNIndonesia.com. (Oktober, 2022). <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20221024081443-255-864405/11-gejala-yang-dialami-pasien-gagal-ginjal-akut-tak-cuma-demam-diare>.

CNNIndonesia.com. (Oktober, 2022). <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221021183312-20-863813/menkes-temukan-102-obat-sirop-dikonsumsi-pasien-gagal-ginjal-akut>.

Dara, Faadhilah; Hira (2023). Analisis framing pada pemberitaan tentang polemik obat sirup anak di [tribunnews.com](http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20886). *Umsu Repository*. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/20886>.

Eriyanto. (2015). *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang.

Hidayati, Ratih Kurnia; Trijayanto, Danang. Citra Kepemimpinan Menteri Kesehatan dalam Penanganan Permasalahan Kesehatan di Indonesia (Framing Budi Gunadi Sadikin pada Pemberitaan di Detik.com Periode November 2022). *PROMEDIA Public Relation dan Media Komunikasi*. Vol.8 No.2 2022. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/kom/article/view/6617>.

Kompas.com. (November, 2022). <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/02/12001891/menkes-sebut-total-kasus-gagal-ginjal-akut-capai-325-meninggal-178-orang>.

Kompas.com. (November, 2022). <https://health.kompas.com/read/2022/11/04/193100768/kemenkes-tegaskan-baru-156-obat-sirup-yang-aman-dikonsumsi?page=all>.

Kompas.com. (November, 2022). <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/18/18370611/keluarga-korban-gagal-ginjal-akut-gugat-pt-afi-farma-hingga-bpom-minta-ganti>.

Kompas.com. (Februari, 2023). <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/09/19162421/gagal-ginjal-muncul-lagi-tim-advokasi-minta-kemenkes-bpom-tanggung-jawab>.

Kompas.com. (Maret, 2023). <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/29/06565701/wamenkes-janji-bakal-sederhanakan-mekanisme-berobat-jalan-pasien-gagal>.

Kompas.com. (Maret, 2023). <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/27/22335341/usai-saling-lempar-kini-persoalan-santunan-gagal-ginjal-akut-dibahas-empat-kementerian>.

Kontan.co.id. (Oktober 2022). <https://nasional.kontan.co.id/news/menkes-budi-ceritakan-awal-mula-kasus-gangguan-ginjal-akut-ditemukan-di-indonesia>.

Liputan6.com (Februari, Oktober 2022). <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5106719/ombudsman-duga-ada-potensi-maladministrasi-kemenkes-dan-bpom-di-kasus-gagal-ginjal-akut>.

Liputan6.com (Oktober, 2022). <https://www.liputan6.com/health/read/5110080/komnas-ham-sebut>

- harus-ada-yang-bertanggung-jawab-untuk-kasus-gagal-ginjal-akut.  
 Liputan6.com (Februari, 2023). <https://www.liputan6.com/health/read/5200154/komisi-ix-dpr-minta-kemenkes-tanggung-biaya-rawat-pasien-suspek-gagal-ginjal-akut>.
- Maghfiroh, Adzkia Avisena dkk. (2023). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak. *Jurnal Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*. Volume 7, Nomor 1, April 2023. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/10527/9903>.
- Novianty, Detty. (2021). Gagal Ginjal Akut Sebagai Komplikasi Covid-19. *Indonesian Journal of Nursing and Health Sciences*. Volume 2 Nomor 1, April 2021 p-ISSN 2746-5497; e-ISSN 2746-5500 <http://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJNHS>.
- Pramelani. (2022). Efek Informasi Khasiat Madu Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Madu Pengganti Obat Sirup. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. <http://journal.stmikjayakarta.ac.id/index.php/jisamar/article/view/676>
- Salman, dkk. (2023). Pengaruh Kandungan Obat Demam Sirup Terhadap Kasus Gagal Ginjal Akut Pada Anak. *Journal of Pharmaceutical and Sciences*. Volume 6 No 2 2023 <https://journal-jps.com/new/index.php/jps/article/view/94/63>
- Scheufele, Dietram. A. (1999). Framing as a theory of media effects. *Journal of Communications, Winter*.
- Shokhikhah, Zilda Khilmatus. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Atas Tidak Terpenuhinya Hak Layanan Kesehatan Di Masa Pandemi. *Airlangga Law Library, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*.
- Siloamhospital.com. (November, 2022). <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/gagal-ginjal-pada-anak>.
- Sobur, Alex. (2015). *Analisis Teks Media Suatu Pengantar Untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotika, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suprianto, Taufik. (Februari, 2022). <https://heylawedu.id/blog/tanggung-jawab-pemerintah-atas-penyelenggaraan-upaya-kesehatan-menurut-undang-undang-kesehatan>
- Tempo.co. (Oktober, 2022). <https://nasional.tempo.co/read/1648537/cerita-keluarga-bayi-pasien-gagal-ginjal-akut-koma-30-hari>.
- Wang D, H. B. (2020). Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. *JAMA*, 323(11):1061.